



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CISURUPAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 92);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CISURUPAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 92) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 117

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN CISURUPAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

- Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 28. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ciburupan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 92);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciburupan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciburupan Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ciburupan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan

Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ciburupan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Ciburupan Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra SKPD/Kecamatan Ciburupan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM		PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1		2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,870,434,097	18.62%	1,093,017,102
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108,678,570	45.45%	49,398,200
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12,529,000	19.55%	2,450,000
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	105,991,050	58.38%	61,880,200
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	344,308,542	26.78%	92,204,000
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92,785,000	50.65%	47,000,100
JUMLAH		6,534,726,259	20.60%	1,345,949,602

Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/ KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp.6.534.726.259,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.345.949.602 atau sebesar 20,60%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 44% untuk target kinerja dan 72% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM		Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1		2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.97%	52.29%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.34%	57.05%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.26%	8.17%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.69%	83.64%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.06%	52.06%
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.33%	81.97%
JUMLAH		44%	72%

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut
Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1		2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,509,457,054	52.32%	1,312,892,685
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,254,000	17.42%	1,960,000
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,254,000	6.21%	140,000
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
	1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,000,000	0%	-
	1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-
	1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,000,000	28%	840,000
	1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3,000,000	32.67%	980,000
	1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,040,669,984	45.61%	930,816,615
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,038,714,784	45.62%	929,976,615
	2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,955,200	42.96%	840,000
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	116,801,400	49.20%	57,471,500
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,297,400	100%	1,297,400
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,486,800	44.63%	29,671,300
	4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,117,200	82.34%	3,390,000
	4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	9,459,200	50.03%	4,732,400
	4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,980,000	50%	5,490,000
	4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu	21,460,800	50%	10,730,400
	4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-
	4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000	72%	2,160,000
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303,663,370	99.86%	303,232,270
	5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
	5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,271,100	99.97%	43,260,070
	5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	260,392,270	99.84%	259,972,200

	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30,776,900	52.70%	16,220,400
	6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		12,304,500	51.56%	6,344,000
	6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2,840,000	50%	1,420,000
	6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		15,632,400	54.10%	8,456,400
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		6,291,400	50.73%	3,191,900
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6,291,400	50.73%	3,191,900
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			86,589,000	57.05%	49,398,200
	1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		79,942,000	55.23%	44,151,200
	1.1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		4,941,900	57.00%	2,816,700
	1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		75,000,100	55.11%	41,334,500
	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		6,647,000	78.94%	5,247,000
	2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		6,647,000	78.94%	5,247,000
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30,000,000	8.17%	2,450,000
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-
	1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	-	-
	2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	-	-
	2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		-	-	-
	3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		30,000,000	8.17%	2,450,000
	3.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		30,000,000	8.17%	2,450,000
	4.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-	-	-
	4.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		-	-	-
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			73,979,800	83.64%	61,880,200
	1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		23,979,600	49.54%	11,880,000
	1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh		50,000,200	100%	50,000,200

V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		177,110,800	52.06%	92,204,000
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	177,110,800	52.06%	92,204,000
	1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15,000,600	32.16%	4,824,000
	1.2	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	162,110,200	53.90%	87,380,000
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57,341,000	81.97%	47,000,100
	1.	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	57,341,000	81.97%	47,000,100
	1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,620,100	72.73%	9,178,500
	1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18,880,200	100%	18,880,200
	1.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	13,340,600	48.28%	6,441,300
	1.4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12,500,100	100%	12,500,100
JUMLAH			2,934,477,654	55,87%	1,565,825,185

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 55,87%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 44,02% untuk target kinerja, dan 55,87% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.25%	52.32%
1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45%	17.42%
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.29%	6.21%
1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0%	0%
1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	33.33%	28%
1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40%	32.67%
1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50%	45.61%
2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50%	45.62%
2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50%	42.96%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	50%	49.20%
4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50%	44.63%
4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50%	82.34%
4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50%	50.03%
4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50%	50%
4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	50%	50%

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50%	72%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.86%
5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.97%
5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100%	99.84%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	52.70%
6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50%	51.56%
6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50%	50%
6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50%	54.10%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12.5%	50.73%
7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.5%	50.73%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50%	57.05%
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50%	55.23%
1.1. Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	50%	57.00%
1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	50%	55.11%
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	54.55%	78.94%
4.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	54.55%	78.94%
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.33%	8.17%
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	8.33%	8.17%
3.1. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	8.33%	8.17%
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
4.1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		
IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50%	83.64%
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50%	83.64%
1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50%	49.54%
1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	100%	100%
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50%	52.06%
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50%	52.06%
1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50%	32.16%
1.2. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	50%	53.90%
VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.55%	81.97%
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.55%	81.97%
1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50%	72.73%
1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	100%
1.3. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	50%	48.28%
1.4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	100%
Jumlah	44.02%	55.87%

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cisarupan Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cisarupan Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cisarupan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7														
7														
7														
7	01	01	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	111,536,240	60,241,700	4,960,000	4,960,000	100%	2,254,000	67,455,700	60.48%
7	01	01	02.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

7	01	01	02.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3,000,000	3,000,000	
7	01	01	02.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						-	-	
7	01	01	02.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						3,000,000	3,000,000	
7	01	01	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD						3,000,000	3,000,000	
7	01	01	02.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	-	
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,769,004,220	3,770,033,148	2,000,308,062	1,923,649,338	96.17%	2,040,669,984	7,734,352,470	79.17%
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9,730,836,981	3,756,330,448	1,995,754,062	1,919,095,338	96.16%	2,038,714,784	7,714,140,570	79.28%

7	01	01	02.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38,167,239	13,702,700	4,554,000	4,554,000	100%	1,955,200	20,211,900	52.96%
7	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	68,165,600	32,387,350	17,697,350	17,691,600	99.97%	0	50,078,950	73.47%
7	01	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31,204,100	17,687,350	17,697,350	17,691,600	99.97%		35,378,950	113.38%
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36,961,500	14,700,000					14,700,000	39.77%
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	629,335,417	275,112,621	135,656,110	135,550,060	99.92%	116,801,400	527,464,081	83.81%
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27,979,362	12,306,250	6,447,250	6,341,450	98.36%	1,297,400	19,945,100	71.29%
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	173,758,697	91,946,350	33,805,950	33,805,700	100%	66,486,800	192,238,850	110.64%
7	01	01	02.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50,637,782	11,992,921	3,309,210	3,309,210	100%	4,117,200	19,419,331	38.35%
7	01	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70,948,654	18,126,500	5,578,500	5,578,500	100%	9,459,200	33,164,200	46.74%

7	01	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	42,761,494	18,840,600	9,895,200	9,895,200	100%	10,980,000	39,715,800	92.88%
7	01	01	02.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	155,221,968	89,760,000	65,280,000	65,280,000	100%	21,460,800	176,500,800	113.71%
7	01	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108,027,460	32,140,000	11,340,000	11,340,000	100%	-	43,480,000	40.25%
7	01	01	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	#DIV/0!
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,923,908,543	2,250,312,200	2,043,856,000	2,032,918,093	99.46%	303,663,370	4,586,893,663	77.43%
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	154,678,000	71,856,000	71,856,000	70,816,000	98.55%	-	142,672,000	92.24%
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan meubeul sesuai kebutuhan	233,323,532	29,869,200	138,137,700	137,756,000	99.72%	-	167,625,200	71.84%
7	01	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165,500,662	50,000,000	83,795,400	83,466,241	99.61%	43,271,100	176,737,341	106.79%
7	01	01	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,370,406,349	2,098,587,000	1,750,066,900	1,740,879,852	99.48%	260,392,270	4,099,859,122	76.34%

7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155,325,098	64,231,967	37,693,967	36,730,322	97.44%	30,776,900	131,739,189	84.82%
7	01	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,167,166	25,369,800	15,100,800	14,140,612	93.64%	12,304,500	51,814,912	95.66%
7	01	01	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,593,332	19,559,000	9,290,000	9,290,000	100.0%	2,840,000	31,689,000	78.06%
7	01	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,564,600	19,303,167	13,303,167	13,299,710	99.97%	15,632,400	48,235,277	79.64%
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,083,976	34,451,640	10,312,200	8,778,800	85.13%	6,291,400	49,521,840	48.99%
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44,875,815	19,153,900	10,312,200	8,778,800	85.13%	6,291,400	34,224,100	76.26%
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56,208,161	15,297,740				0	15,297,740	27.22%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	683,759,080	57,361,700	62,960,700	62,955,700	99.99%	86,589,000	206,906,400	30.26%

7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	572,304,097	57,361,700	57,316,700	57,316,700	100%	79,942,000	194,620,400	34.01%
7	01	02	02.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-				4,941,900	4,941,900	
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	572,304,097	57,361,700	57,316,700	57,316,700	100%	75,000,100	189,678,500	33.14%
					Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang di ikutsertakan dalam pelaksanaan perlombaan evaluasi perkembangan desa.							-	
7	01	02	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	111,454,983	5,664,000	5,644,000	5,639,000	99.91%	6,647,000	17,950,000	16.11%
7	01	02	02.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	13,286,250		5,644,000	5,639,000	99.91%	6,647,000	12,286,000	92.47%
					Perencanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							-	

					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98,168,733	5,664,000				5,664,000	5.77%	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	84,252,769	38,214,300	-	-	0.00%	30,000,000	68,214,300	80.96%
7	01	03	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	59,807,469	13,769,000	-	-		13,769,000	23.02%	
7	01	03	02.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49,697,193	13,769,000				13,769,000	27.71%	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24,445,300	24,445,300	-	-		24,445,300	100.00 %	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TPKK Kecamatan	24,445,300	24,445,300				24,445,300	100.00%	
7	01	03	02.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							-		
7	01	03	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						30,000,000	30,000,000	

7	01	03	02.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							30,000,000	30,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	271,691,603	28,360,000	28,360,000	28,360,000	100%		73,979,800	130,699,800	48.11%
7	01	04	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	241,124,603	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100%		73,979,800	111,979,800	46.44%
7	01	04	02.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	101,225,553	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100%		23,979,600	61,979,600	61.23%
7	01	04	02.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	139,899,050	-					50,000,200	50,000,200	35.74%
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	30,567,000	9,360,000	9,360,000	9,360,000	100%			18,720,000	61.24%
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30,567,000	9,360,000	9,360,000	9,360,000	100%		18,720,000	61.24%	

7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camatpada Camat	1,136,285,242	428,886,400	219,886,400	219,795,000	99.96%	177,110,800	825,792,200	72.67%
7	0	0	02.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1,136,285,242	428,886,400	219,886,400	219,795,000	99.96%	177,110,800	825,792,200	72.67%
7	01	05	02.01	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	88,554,900	28,886,400	19,886,400	19,835,000	99.74%	15,000,600.00	63,722,000	71.96%
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							-	

7	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	942,730,342	400,000,000	200,000,000	199,960,000	99.98%	162,110,200.00	762,070,200	80.84%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa Berkinerja Baik	228,959,661	63,663,200	63,663,200	-	0.00%	57,341,000	121,004,200	52.85%
7	01	06	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	228,959,661	63,663,200	63,663,200		0.00%	57,341,000	121,004,200	52.85%
7	01	06	02.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63,508,960	12,491,000	12,491,000	12,491,000	100%	12,620,100	37,602,100	59.21%
7	01	06	02.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						18,880,200	18,880,200	
7	01	06	02.01	12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan	89,733,814	25,560,000	25,560,000	25,560,000	100%	13,340,600	64,460,600	71.84%
7	01	06	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	75,716,887	25,612,200	25,612,200	25,612,200	100%	12,500,100	63,724,500	84.16%

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD, TA 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Cisurupan Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.2.934.477.654,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.565.825.185,00 atau mencapai 53,36%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Cisurupan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisurupan
Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,509,457,054	1,312,892,685	52.32%
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,254,000	1,960,000	17.42%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,254,000	140,000	6.21%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,000,000	-	0%
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,000,000	840,000	28%
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	980,000	32.67%
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,040,669,984	930,816,615	45.61%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,038,714,784	929,976,615	45.62%
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,955,200	840,000	42.96%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116,801,400	57,471,500	49.20%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,297,400	1,297,400	100.00%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,486,800	29,671,300	44.63%
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,117,200	3,390,000	82.34%
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,459,200	4,732,400	50.03%
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,980,000	5,490,000	50.00%
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,460,800	10,730,400	50.00%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000	2,160,000	72.00%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303,663,370	303,232,270	99.86%
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,271,100	43,260,070	99.97%

5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260,392,270	259,972,200	99.84%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30,776,900	16,220,400	52.70%
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12,304,500	6,344,000	51.56%
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,840,000	1,420,000	50.00%
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,632,400	8,456,400	54.10%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,291,400	3,191,900	50.73%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6,291,400	3,191,900	50.73%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86,589,000	49,398,200	57.05%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	79,942,000	44,151,200	55.23%
1.1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4,941,900	2,816,700	57.00%
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75,000,100	41,334,500	55.11%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6,647,000	5,247,000	78.94%
2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6,647,000	5,247,000	78.94%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,000,000	2,450,000	8.17%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30,000,000	2,450,000	8.17%
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30,000,000	2,450,000	8.17%
4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73,979,800	61,880,200	83.64%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73,979,800	61,880,200	83.64%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23,979,600	11,880,000	49.54%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50,000,200	50,000,200	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	177,110,800	92,204,000	52.06%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	177,110,800	92,204,000	52.06%

1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15,000,600	4,824,000	32.16%
1.2	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	162,110,200	87,380,000	53.90%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57,341,000	47,000,100	81.97%
	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57,341,000	47,000,100	81.97%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,620,100	9,178,500	72.73%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18,880,200	18,880,200	100%
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	13,340,600	6,441,300	48.28%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12,500,100	12,500,100	100%

Sumber : SPJ Fungsional Kec.Cisurupan Bulan Juni, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan ada proses review/pembahasan terkait kebijakan pemerintah tentang pencabutan PKPPM, sehingga penyerapan anggaran dari kegiatan penanganan covid-19 tidak dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

Selain itu, terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang sudah mencapai target kinerja hasil/keluaran, namun 2 (dua) sub kegiatan pengadaan dari segi anggarannya tidak terserap utuh disebabkan hasil nilai kontrak pengadaan. Sub kegiatan-kegiatan yang sudah mencapai target adalah:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor total anggaran Rp.1.297.400,00 (100%) realisasi Rp. Rp.1.297.400,00 atau (100%).
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya total anggaran Rp.43.271.100,00 (100%) realisasi Rp.43.260.070,00 atau (99,97%).
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya total anggaran Rp.260.392.270,00 (100%) realisasi Rp.259.972.200,00 atau (99,84%).
- 4) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat total anggaran Rp.50.000.200,00 (100%) realisasi Rp.50.000.200,00 atau (100%).
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa total anggaran Rp.18.880.200,00 (100%) realisasi Rp.18.880.200,00 atau (100%).

- 6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif total anggaran Rp.12.500.100,00 (100%) realisasi Rp.12.500.100,00 atau (100 %).

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ciburupan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ciburupan Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Ciburupan Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ciburupan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- 2) Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/SKPD dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Ciburupan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023 (TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12			13= 6+12		14=13/5 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN	100%	683,759,080	100%	63,025,700	100%	86,589,000		3,847,000		45,551,200			100%	46,581,500		109,607,200				16.0%
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	100%	572,304,097	100%	57,361,700		79,942,000		840,000		43,311,200				41,334,500		98,696,200				17.2%
		Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%			-		4,941,900		840,000		1,976,700				2,816,700		2,816,700				

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 Kegiatan	572,304,097		57,361,700		75,000,100		-		41,334,500					41,334,500	98,696,200		17.2%
		Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang di ikutsertakan dalam pelaksanaan perlombaan evaluasi perkembangan desa.	0			-												-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	111,454,983		5,664,000		6,647,000		3,007,000		2,240,000					5,247,000	10,911,000		9.8%
		Perencanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monitoring program bansos (BPNT, PKH, Fasilitas kegiatan keagamaan (MTQ) fasilitas kegiatan olahraga, honor Covid	12 Laporan	13,286,250	0	-		-		-		-					-	-		0.0%
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	98,168,733	100	5,664,000		6,647,000		3,007,000		2,240,000					5,247,000	10,911,000		11.1%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	100%	271,691,603		28,360,000	100%	73,979,800		5,940,000		55,490,200		100%			61,880,200	90,240,200		33.2%

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	100%	241,124,603	19,000,000	73,979,800	5,940,000	55,490,200	61,880,200	80,880,200	33.5%	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	26 Kali	101,225,553	100	19,000,000	23,979,600	5,940,000	5,940,000	11,880,000	30,880,000	30.5%
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	3 Kegiatan	139,899,050	0	-	50,000,200	-	-	50,000,200	50,000,200	35.7%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	100%	30,567,000	9,360,000	-	-	-	-	9,360,000	30.6%	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36 Kali	30,567,000	0	9,360,000	-	-	-	9,360,000	30.6%	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat	100%	1,136,285,242	100%	428,886,400	177,110,800	56,118,500	36,085,500						92,204,000	521,090,400	45.9%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		1,136,285,242	100%	428,886,400	177,110,800	56,118,500	36,085,500						92,204,000	521,090,400	45.9%
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	5 Kali	88,554,900	0	28,886,400	15,000,600	4,824,000	-						4,824,000	33,710,400	38.1%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29 Kali	942,730,342	100	400,000,000	162,110,200	51,294,500	36,085,500						87,380,000	487,380,000	51.7%

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	228,959,661	0	63,663,200	57,341,000	23,592,800	23,407,300						28,119,900	91,783,100	40.1%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	228,959,661	0	63,663,200	57,341,000	23,592,800	23,407,300						28,119,900	91,783,100	40.1%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Kali	63,508,960	0	12,491,000	12,620,100	6,238,500	2,940,000						9,178,500	21,669,500	34.1%
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kali	-	-	-	18,880,200	560,000	18,320,200						18,880,200	18,880,200	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi kegiatan kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	5 Kali	89,733,814	0	25,560,000	13,340,600	4,294,200	2,147,100						6,441,300	32,001,300	35.7%
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	75,716,887	0	25,612,200	12,500,100	12,500,100	-						12,500,100	38,112,300	50.3%

3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	84,252,769	100%	38,214,300	30,000,000	2,450,000	0	2,450,000	40,664,300	48.3%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	59,807,469	100%	13,769,000	0	0	0	-	13,769,000	23.0%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Desa	49,697,193	100%	13,769,000	0	0	0	-	13,769,000	27.7%
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		24,445,300	100%	24,445,300	0	0	0	-	24,445,300	100.0%
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Kecamatan	1 Kali	24,445,300	100%	24,445,300	0	0	0	-	24,445,300	100.0%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	12 bln				30,000,000	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dok				30,000,000	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	16,758,359,094	100%	6,486,770,626	2,509,457,054	402,802,629	676,352,786	1,309,122,685	7,795,893,311	46.5%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		111,536,240	100%	60,241,700	11,254,000	1,400,000	-	140,000	60,381,700	54.1%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kecamatan	3 Dokumen	111,536,240	100%	60,241,700	2,254,000	140,000	-	140,000	60,381,700	54.1%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		100%		3,000,000	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		100%		3,000,000	840,000		840,000	840,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		100%		3,000,000	420,000		980,000	980,000	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9,769,004,220		3,770,033,148		2,040,669,984		357,283,529		573,533,086					930,816,615		4,700,849,763		48.1%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	9,730,836,981		3,756,330,448		2,038,714,784		356,863,529		573,113,086					929,976,615		4,686,307,063		48.2%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27 Laporan	38,167,239	100	13,702,700		1,955,200		420,000		420,000					840,000		14,542,700		38.1%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan		68,165,600		32,387,350		-		-		-					-		32,387,350		47.5%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57 Stei	31,204,100		17,687,350		-		-		-					-		17,687,350		56.7%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dibina	9 Orang	36,961,500		14,700,000		-		-		-					0		14,700,000		39.8%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		629,335,417		275,112,621		116,801,400		30,979,100		26,492,400					55,521,500		330,634,121		52.5%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Item	27,979,362	100	12,306,250		1,297,400		1,297,400		-					1,297,400		13,603,650		48.6%

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	129 Jenis	173,758,697	100	91,946,350	66,486,800	15,602,200	14,069,100							29,671,300	121,617,650	70.0%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang memadai	53 Item	50,637,782	100	11,992,921	4,117,200	3,390,000	-							3,390,000	15,382,921	30.4%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 Bulan	70,948,654	100	18,126,500	9,459,200	2,403,200	2,329,200							4,732,400	22,858,900	32.2%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	268 Exsemplar	42,761,494	100	18,840,600	10,980,000	2,711,100	2,778,900							5,490,000	24,330,600	56.9%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4360 Orang	155,221,968	100	89,760,000	21,460,800	5,365,200	5,365,200							10,730,400	100,490,400	64.7%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1548 Oh	108,027,460	100	32,140,000	-	-	-							-	32,140,000	29.8%
		Penatausahaan arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPPD	2 Dokumen	-	-	-	3,000,000	210,000	1,950,000							210,000	210,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,923,908,543		2,250,312,200	303,663,370	-	70,055,000							303,232,270	2,553,544,470	43.1%

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	154,678,000	0	71,856,000	-	-	-	-	-	-	-	-	71,856,000	46.5%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	8 Item	233,323,532		29,869,200	-	-	-	-	-	-	-	-	29,869,200	12.8%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	165,500,662	0	50,000,000	43,271,100	-	-	-	-	-	43,260,070	-	93,260,070	56.4%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,370,406,349		2,098,587,000	260,392,270	-	-	70,055,000	-	-	259,972,200	-	2,358,559,200	43.9%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		155,325,098		64,231,967	30,776,900	10,053,400	6,167,000			16,220,400		80,452,367	51.8%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan telepon/internet, air dan listrik	26 Bulan	54,167,166		25,369,800	12,304,500	3,177,000	3,167,000			6,344,000		31,713,800	58.5%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan kerja sesuai kebutuhan	9 Item	40,593,332	100	19,559,000	2,840,000	1,420,000	-			1,420,000		20,979,000	51.7%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27 Bulan	60,564,600	100	19,303,167	15,632,400	5,456,400	3,000,000			8,456,400		27,759,567	45.8%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		101,083,976		34,451,640	6,291,400	3,086,600	105,300			3,191,900		37,643,540	37.2%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	23 Unit	44,875,815		19,153,900	6,291,400	3,086,600	105,300			3,191,900		22,345,800	49.8%	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantor dan Atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56,208,161	100	15,297,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,297,740		27.2%	
				19,163,307,449													8,649,278,511			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			45%	
Predikat Kinerja																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																				
Faktor penghambat																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																				

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023

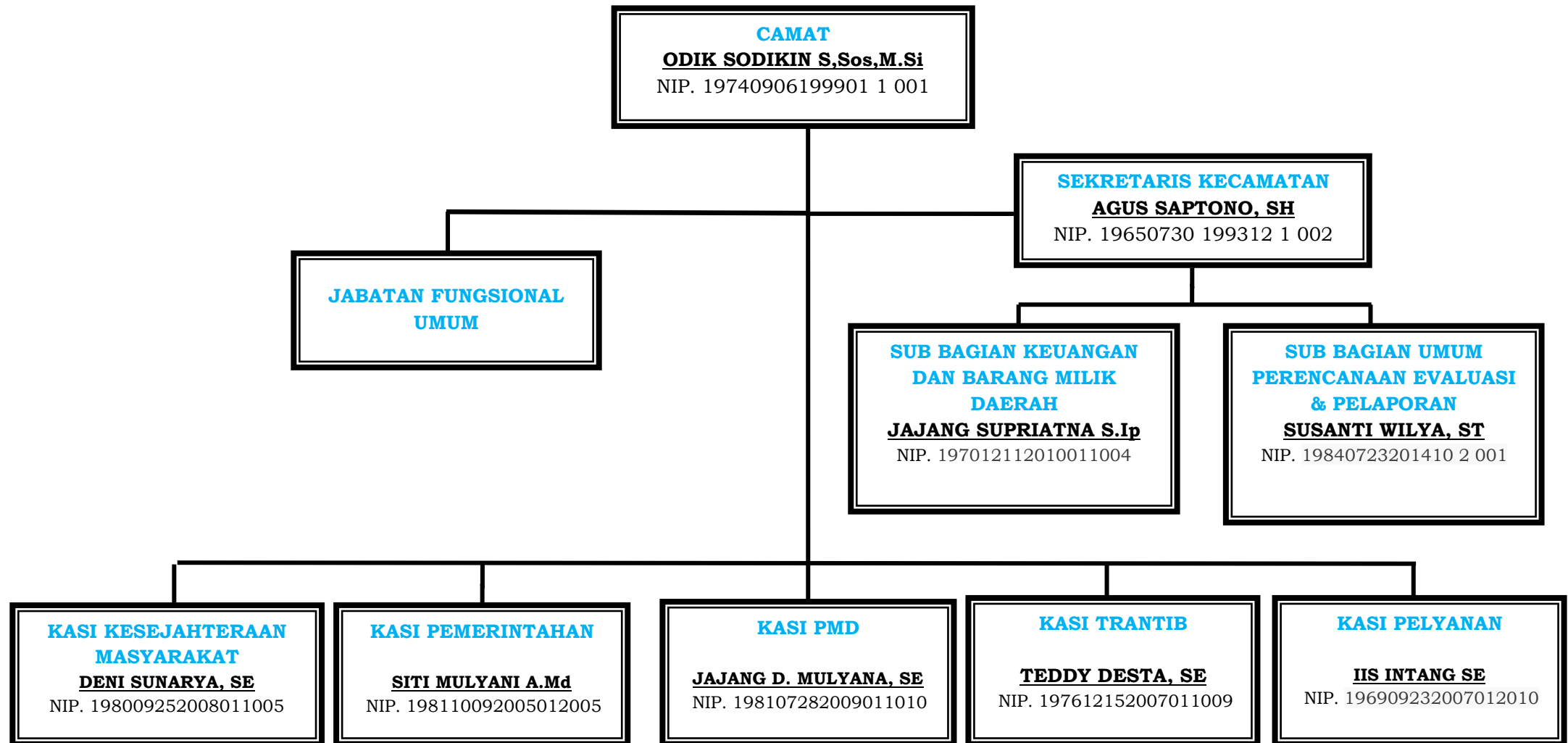


2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Ciurupan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisurupan Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisurupan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Cisurupan



Sumber: Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagai berikut:

- 1) Camat;
Camat membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- 3) Seksi - Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

- 1) Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang

- Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian

lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

- 1) Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Seksi Pelayanan

- 1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 4) Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
- 5) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			76	77	78	79	81,76	81,95	78	79	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	70	75	80	70,16	78,19	75	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	90	95	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	B	B	B	BB	

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Cisarupan, 2023

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciburupan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan ekstrem pasca pandemi.
5. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.
7. Belum optimalnya penguatan infrastruktur Dan peningkatan kapasitas SDM.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya:

1. Belum meratanya kemampuan SDM dalam hal pemahaman Tugas fungsi dan target kinerja masing-masing.
2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan masih kurang.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciburupan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;

- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Cisurupan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisurupan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Cisurupan Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka review terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Cisurupan Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Cisurupan Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Cisurupan Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 31 sub kegiatan;

3. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.783.749.203,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Cisurupan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.783.749.203,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Cisurupan Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp.3.058.366.121,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp.123.888.467,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.2.934.477.654,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.783.749.203,00 atau berkurang Rp.150.728.451,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
4. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Cisurupan Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cisarupan

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2,580,089,921	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2,359,328,603	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12,934,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11,254,000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,109,622,851	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,890,541,532
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	116,801,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	114,917,701
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	303,663,370	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	303,663,370
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30,776,900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32,660,600

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,291,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,291,400
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	92,127,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	113,539,000
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	100%	83,053,400	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	100%	106,892,000

2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	100%	9,074,100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	100%	6,647,000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	30,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	2,450,000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	2,450,000

IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	77,806,900	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	73,979,800
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	77,806,900	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	73,979,800
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	100%	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	100%	-
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	215,000,800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	177,110,800

1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	100%	215,000,800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	100%	177,110,800
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	63,341,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	57,341,000
1	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	63,341,000	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	57,341,000
JUMLAH					3,058,366,121					2,783,749,203

Tabel 2. 10
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Priori tas	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023									
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1		KECAMATAN							6,138,173,431	2,934,477,454	2,783,749,203					3,062,124,123		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	%	90 %	90 %	5,380,307,731	2,509,457,054	2,359,328,603					90 %	2,595,261,463		
7	1	1	02 .0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	%	%	1 Laporan	1 Laporan	21,934,000	11,254,000	11,254,000					100 %	12,379,400	
7	1	1	02. 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	%	%	3 dokum en	3 dokum en	3,934,000	2,254,000	2,254,000	Kab. Garut, Cisuru pan, Balewa ngi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkat an pelayana n publik dan kinerja aparatur	0	1 dokume n	2,479,400	Kecamata n Cisurupa n
7	1	1	02. 01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%	%	1 dokum en	1 dokum en	3,000,000									
7	1	1	02. 01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	%	1 dokum en	1 dokum en	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Garut, Cisuru pan, Balewa ngi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkat an pelayana n publik dan kinerja aparatur	0	1 dokume n	3,300,000	Kecamata n Cisurupa n
7	1	1	02. 01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	%	%	1 dokum en	1 dokum en	3,000,000									
7	1	1	02. 01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	%	%	1 dokum en	1 dokum en	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Garut, Cisuru pan, Balewa ngi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkat an pelayana n publik dan kinerja aparatur	0	1 dokume n	3,300,000	Kecamata n Cisurupa n
7	1	1	02. 01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	%	%	3 Lapora n	3 Lapora n	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Garut, Cisuru pan, Balewa ngi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkat an pelayana n publik dan kinerja aparatur	0	1 dokume n	3,300,000	Kecamata n Cisurupa n

7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Petangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	4 Laporan	4 Laporan	3,000,000									
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	1 Dokumen	1 Dokumen	2,670,622,131	2,040,669,984	1,890,541,532					1 Dokumen	2,079,595,685	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	%	12 bulan	12 bulan	2,659,552,531	2,038,714,784	1,888,586,332	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 tahun	2,077,444,965	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	%	25 laporan	25 laporan	11,069,600	1,955,200	1,955,200	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	2,150,720	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	%	%	1 Laporan	1 Laporan	9,580,000	-	-					100 %	-	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	%	%	23 orang	23 orang	9,580,000	-	-	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	23 orang	-	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	1 Laporan	1 Laporan	240,556,000	116,801,400	114,917,701					12 Laporan	126,409,471	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	%	%	5 item	5 item	4,596,800	1,297,400	1,297,400	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	6 jenis	1,427,140	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	%	41 paket	41 paket	77,915,300	66,486,800	64,599,901	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	6 jenis	71,059,891	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	%	%	21 paket	21 paket	16,144,700	4,117,200	4,117,200	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	18 item	4,528,920	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	%	%	2 paket	2 paket	14,778,400	9,459,200	9,462,400	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 jenis	10,408,640	Kecamatan Cisarupan

7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	%	%	1 dokumen	1 dokumen	10,980,000	10,980,000	10,980,000	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	122 koran/majalah	12,078,000	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	%	12 Laporan	12 Laporan	103,060,800	21,460,800	21,460,800	Kab. Garut, Cisarupan, Cisarupan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1632 orang	23,606,880	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	%	12 Laporan	12 Laporan	10,080,000	0	0	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	72 Hok	-	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	%	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			3,300,000	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	3 jenis	3 jenis	2,367,956,300	303,663,370	303,663,370					3 jenis	334,029,707	
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	%	%	2 unit	2 unit	87,618,300	-	-	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 unit	-	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	%	%	4 unit	4 unit	177,552,500	-	-	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	26 buah	-	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	%	%	3 unit	3 unit	119,758,500	43,271,100	43,271,100	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0		47,598,210	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	%	%	1 unit	1 unit	1,983,027,000	260,392,270	260,392,270	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 unit	286,431,497	Kecamatan Cisarupan

7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	1 Laporan	1 Laporan	49,123,200	30,776,900	32,660,600					3 Jenis	35,926,660	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	%	12 bulan	12 bulan	12,304,500	12,304,500	14,188,200	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 jenis	15,607,020	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	%	2 jenis	2 jenis	8,800,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 jenis	3,124,000	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	%	12 bulan	12 bulan	28,018,700	15,632,400	15,632,400	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	9 item	17,195,640	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	2 Laporan	2 Laporan	20,536,100	6,291,400	6,291,400					2 Laporan	6,920,540	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	%	%	7 unit	7 unit	17,160,400	6,291,400	6,291,400	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	9 unit	6,920,540	Kecamatan Cisarupan
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	%	1 unit	1 unit	3,375,700			Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	% Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	%	100 %	100 %	163,338,900	86,589,000	113,539,000					100 %	124,892,900	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	%	%	2 Laporan	2 Laporan	155,664,800	79,942,000	106,892,000					2 kegiatan	117,581,200	
7	1	2	02.01	0	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	%	%	1 Laporan	1 Laporan	46,114,600	4,941,900	31,891,900	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			35,081,090	Kecamatan Cisarupan

7	1	2	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	1 dokumen	1 dokumen	109,550,200	75,000,100	75,000,100	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 kegiatan	82,500,110	Kecamatan Cisarupan	
7	1	2	02.02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	%	4 Jenis	4 Jenis	7,674,100	6,647,000	6,647,000					4 Jenis	7,311,700	Kecamatan Cisarupan	
7	1	2	02.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	%	%	6 dokumen	2 dokumen	7,674,100	6,647,000	6,647,000	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 laporan	7,311,700	Kecamatan Cisarupan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	%	1	1	59,243,500	30,000,000	2,450,000					1	2,695,000	Kecamatan Cisarupan	
7	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%	%	1 Laporan	1 Laporan	9,243,500										
7	1	3	02.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	%	1 Lembaga	1 Lembaga	9,243,500			Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur					Kecamatan Cisarupan
7	1	3	02.05	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	30,000,000	2,450,000					1 Kegiatan	2,695,000		
7	1	3	02.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	%	%	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	30,000,000	2,450,000	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Kegiatan	2,695,000	Kecamatan Cisarupan	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100 %	100 %	53,602,900	73,979,600	73,979,800					100 %	81,377,780		
7	1	4	02.01	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	%	%	2 Laporan	2 Laporan	53,602,900	73,979,600	73,979,800					2 jenis	81,377,780		
7	1	4	02.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	%	1 Laporan	1 Laporan	19,059,600	23,979,600	23,979,600	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 kegiatan	26,377,560	Kecamatan Cisarupan	
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	%	%	1 Laporan	1 Laporan	34,543,300	50,000,000	50,000,200	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			55,000,220	Kecamatan Cisarupan	
7	1	4	02.02	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	%	%	100 %	100 %	-	-	-					100 %	-		

7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	%		%	12 bulan	12 bulan	-	-	-	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 bulan	-	Kecamatan Cisarupan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat/pada Camat	%		%	100 %	100 %	384,634,600	177,110,800	177,110,800					100 %	194,821,880	
7	1	5	02.01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	384,634,600	177,110,800	177,110,800					100 %	194,821,880	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%		%	60 Orang	60 Orang	45,907,400	15,000,600	15,000,600	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 kegiatan	16,500,660	Kecamatan Cisarupan
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%		%	250 Orang	250 Orang	95,191,100			Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%		%	1 dokumen	1 dokumen	243,536,100	162,110,200	162,110,200	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 bulan	178,321,220	Kecamatan Cisarupan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	%		%	100 %	100 %	97,045,800	57,341,000	57,341,000					100 %	63,075,100	
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	1 Laporan	1 Laporan	97,045,800	57,341,000	57,341,000					1 Laporan	63,075,100	Kecamatan Cisarupan
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	%		%	4 Dokumen	4 Dokumen	17,433,500	12,620,100	12,620,100	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	10 bulan	13,882,110	Kecamatan Cisarupan
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	%		%	1 dokumen	1 dokumen	15,524,600	18,880,200	18,880,200	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			20,768,220	Kecamatan Cisarupan

7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan	%		%	1 dokumen	1 dokumen	36,211,600	13,340,600	13,340,600	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 kegiatan	14,674,660	Kecamatan Cisarupan
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	%		%	1 dokumen	1 dokumen	27,876,100	12,500,100	12,500,100	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 dokumen	13,750,110	Kecamatan Cisarupan
TOTAL												6,138,173,431	2,934,477,454	2,783,749,203						3,062,124,123	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam

upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut adalah salah satu Kecamatan yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cisurupan Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - b. Nilai SKM;
2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai Sinergitas Kecamatan;

3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator:
 - a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Cisurupan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	78
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Cisurupan, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2023 dikelola melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Pagu
	Kecamatan Cisarupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,359,328,603
			Perencanaan. Penggangan. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,254,000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,254,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,000,000

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,890,541,532
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,888,586,332
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,955,200
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		114,917,701
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,297,400
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,599,901
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,117,200
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,462,400
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,980,000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,460,800
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		303,663,370

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,271,100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260,392,270
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32,660,600
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,188,200
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,840,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,632,400
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,291,400
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6,291,400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			113,539,000
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		106,892,000
				Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	31,891,900
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75,000,100

			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		6,647,000
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6,647,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2,450,000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		2,450,000
				Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2,450,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			73,979,800
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		73,979,800
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23,979,600
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50,000,200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			177,110,800
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		177,110,800

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15,000,600	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	162,110,200	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			57,341,000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		57,341,000	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,620,100	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18,880,200	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13,340,600	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12,500,100	
		Total	6	12	31	2,783,749,203

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan kewilayahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu Bidang Pemerintahan Umum.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 31 subkegiatan;
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.783.749.203,00, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 6.138.173.431,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp. 3.079.807.310,00 pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp.3.058.366.121,00, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp.274.616.918,00 menjadi sebesar Rp.2.783.749.203,00, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cisarupan Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3. 3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Cisarupan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Cisarupan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN														3.058.366.121	2.783.749.203		3.062.784.123
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2.580.089.921	2.359.928.603		2.595.921.463
7	1	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														12.934.000	11.254.000		12.379.400
7	1	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kecamatan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	78 BB	78 BB	3.934.000	2.254.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	2.479.400	
7	1	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	78 BB	78 BB	3.000.000	3.000.000				3.300.000	
7	1	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	78 BB	78 BB	3.000.000	3.000.000				3.300.000	

7	1	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	78 BB	78 BB	3.000.000	3.000.000							3.300.000		
7	1	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.109.622.851	1.890.541.532									2.079.595.685
7	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran Gaji dan tunjangan Pegawai	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	78 BB	78 BB	2.105.987.651	1.888.586.332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan tepat waktu	100 %			2.077.444.965		
7	1	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 BB	78 BB	3.635.200	1.955.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan tepat waktu	100 %			2.150.720		
7	1	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0									-
7	1	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	23 orang	23 orang	78 BB	78 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %			-		
7	1	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											116.801.400	114.917.701									127.069.471
7	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor sesuai kebutuhan yang memadai	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	78 BB	78 BB	1.297.400	1.297.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %			1.427.140		
7	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	78 BB	78 BB	66.486.800	64.599.901	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %			71.719.891		
7	1	1	2:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang memadai	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	18 item	18 item	78 BB	78 BB	4.117.200	4.117.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %			4.528.920		

7	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	78 BB	78 BB	9.459.200	9.462.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10.408.640
7	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	122 koran/majalah	122 koran/majalah	78 BB	78 BB	10.980.000	10.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	12.078.000
7	1	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian, jamuan tamu sesuai kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Cisarupan	100 %	100 %	1632 orang	1632 orang	78 BB	78 BB	21.460.800	21.460.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	23.606.880
7	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	72 Hok	72 Hok	78 BB	78 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	-
7	1	1	2:06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	78 BB	78 BB	3.000.000	3.000.000				3.300.000
7	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											303.663.370	303.663.370				334.029.707
7	1	1	2:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	Jumlah Penyediaan Kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	2 unit	2 unit	78 BB	78 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	100 %	-
7	1	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	Jumlah meubel sesuai kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	26 buah	26 buah	78 BB	78 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	100 %	-
7	1	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik		Nilai Sakip		100 %	100 %			78 BB	78 BB	43.271.100	43.271.100		Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	100 %	47.598.210
7	1	1	2:07	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 unit	1 unit	78 BB	78 BB	260.392.270	260.392.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Aset Dalam Keadaan Baik	100 %	286.431.497
7	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											30.776.900	32.660.600				35.926.660

7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Fasilitas Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran langganan telepon/internet, air dan listrik	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	78 BB	78 BB	12.304.500	14.188.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15.607.020
7	1	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Fasilitas Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perbaikan peralatan kerja sesuai kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	78 BB	78 BB	2.840.000	2.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.124.000
7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Fasilitas Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	jumlah alat dan bahan kebersihan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	9 item	9 item	78 BB	78 BB	15.632.400	15.632.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	17.195.640
							Jumlah pelaksana tenaga kebersihan					2 orang	2 orang								-
7	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											6.291.400	6.291.400				6.920.540
7	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Jumlah Pembayaran STNK dan servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	Nilai Sakip	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	9 unit	9 unit	78 BB	78 BB	6.291.400	6.291.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100 %	6.920.540
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											92.127.500	113.539.000				124.892.900
7	1	2	2:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											83.053.400	106.892.000				117.581.200
					Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	8.053.300	31.891.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	35.081.090
7	1	2	2:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Monitoring program Bansos (BPNT, PKH, dll); Honor Covid, Monitoring pembangunan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	75.000.100	75.000.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	82.500.110
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											9.074.100	6.647.000				7.311.700
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang	Nilai SKM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	9.074.100	6.647.000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan	100 %	

					dan Pelayanan Publik	dilaksanakan di Kecamatan								Alokasi Umum	publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															30.000.000	2.450.000													2.695.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)															30.000.000	2.450.000												2.695.000	
					Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Kegiatan PPKM di Masyarakat	Nilai SKM	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	30.000.000	2.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %		2.695.000						
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											77.806.900	73.979.800					81.377.780							
7	1	4	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											77.806.900	73.979.800					81.377.780							
7	1	4	2:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/Polri	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	27.806.700	23.979.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	100 %		26.377.560						
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	50.000.200	50.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	100 %		55.000.220						
7	1	4	2:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											0	0					-							
7	1	4	2:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan Perda/Perkada	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisarupan, Balewangi	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Tantribum	100 %		-						
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											215.000.800	177.110.800					194.821.880							
7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											215.000.800	177.110.800					194.821.880							

7	1	5	2:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pembinaan kebangsaan melalui pelaksanaan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	15.000.600	15.000.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	16.500.660
7	1	5	2:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat	jumlah pelaksanaan aktivitas lapangan /penanganan wabah	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	100 %	100 %	12 bulan		100 %	100 %	200.000.200	162.110.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	178.321.220
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											63.341.000	57.341.000				63.075.100
7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											63.341.000	57.341.000				63.075.100
7	1	6	2:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah monitoring evaluasi PBB	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	100 %	100 %	10 bulan	10 bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	-
							Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa					17 kali	17 kali		15.000.100	12.620.100				13.882.110	
7	1	6	2:01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	20.000.200	18.880.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20.768.220
7	1	6	2:01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah pelaksanaan kegiatan kelembagaan Masyarakat Tingkat kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	100 %	13.340.600	13.340.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	14.674.660

7	1	6	2:01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah dokumen RPTK	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cisurupan, Balewangi	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	15.000.100	12.500.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	13.750.110
TOTAL																3.058.366.121	2.783.749.203			3.062.784.123	

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja SKPD Cisarupan Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN